

BAB II

GAMBARAN UMUM KEKERASAN SEKSUAL DI KANADA

Gambaran umum kasus *sexual violence* di Kanada merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian ini karena gambaran umum akan memberikan informasi mengenai bagaimana kasus kekerasan seksual di Kanada. Selain itu, bagian ini juga memberikan pemahaman mengenai fenomena *rape culture* dan bentuk-bentuknya. Sehingga dalam bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum kekerasan seksual di Kanada dan bagaimana pemerintah Kanada menyikapi kasus kekerasan seksual dan viktimisasi terhadap perempuan.

2.1. Fenomena Kekerasan Seksual di Kanada

Kekerasan seksual atau *sexual violence* adalah jenis kriminalitas yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera di Kanada. Pemerintahan Kanada telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dengan cara membuat hukum untuk menjerat pelaku namun masih ada hambatan besar yang tertanam dalam pemikiran masyarakat. Hambatan itu berupa *rape culture* yang merupakan konstruksi masyarakat yang umum di Kanada. *Rape culture* di Kanada merupakan hal yang lazim baik di kota kecil seperti kota Manitoba sampai kota besar Toronto yang dapat berupa *victim blaming*, *slut shaming*, dan obyektifikasi terhadap perempuan terutama korban kekerasan seksual meskipun ada hukum yang menjerat pelaku kekerasan seksual.

Isu *rape culture* bukanlah isu permasalahan antara negara kawasan barat atau timur, utara atau selatan, namun permasalahan seluruh dunia.¹ Salah satu langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual adalah dengan menghapus nilai-nilai *rape culture* yang telah membudaya. *Rape culture* merupakan suatu fenomena yang perlu ditangani karena merupakan salah satu penghalang dari terciptanya kesetaraan gender. Masyarakat yang terlahir dengan konstruksi pemikiran *rape culture* lebih mengajarkan anak perempuan atau perempuan untuk menghindari pemerkosaan, pelecehan, dan kekerasan seksual dengan cara berpakaian yang sopan dan tertutup, bertutur kata lembut, dan berperilaku sesuai norma daripada mengurangi ancaman kejahatan itu sendiri.² Konstruksi sosial ini juga menekankan pemikiran “*don’t get raped*” daripada “*don’t rape*”.³ Konstruksi tersebut menggambarkan bagaimana nilai-nilai sosial mengajarkan bahwa kalau bisa korban “jangan sampai diperkosa” daripada mengajarkan pelaku “jangan sampai memperkosa”. Konstruksi *rape culture* juga melegalkan bahwa seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan laki-laki adalah halal. Secara tidak langsung *rape culture* menolerir, menormalkan, dan membenarkan perlakuan buruk terhadap perempuan.

Fenomena sosial *rape culture* yang juga perlu ditangani karena dapat berdampak ke berbagai aspek baik budaya, pendidikan, serta ekonomi. Dampak

¹ Cecilia Benoit, *Issue Brief: Sexual Violence Against Women in Canada*, Federal Provincial Territorial Senior Officials for The Status of Women Journal, May 2014, Canada Federal Provincial Governments, Hal 16.

² Fletcher, (2010), *Dismantling Rape Culture around the World: A Social Justice Imperative*. *Forum on Public Policy* diakses dalam <http://forumonpublicpolicy.com/vol2010.no4/archive.vol2010.no4/fletcher.pdf> (20/05/2016, 01:10 WIB).

³Kaitlynn Mendes, 2015, *SLUTWALK: Feminism, Activism, and Media*, England: Palgrave Macmillan, hal. 4.

dari *rape culture* ini dapat dilihat dari apa yang dialami Kanada pada tahun 1995 terkait “*Selected Evidence Data*”, yang mana pemerintahan Kanada mengalami kerugian sebesar lima miliar dollar US lebih akibat efek kekerasan seksual seperti isolasi, ketidakmampuan untuk bekerja, kehilangan upah, ketidakinginan melanjutkan pendidikan karena perasaan malu, serta penderitaan secara fisik yang dialami korbannya.⁴

Istilah *Rape* merupakan bahasa Inggris dari memerkosa sehingga *rape culture* dapat didefinisikan sebagai fenomena sosial dimana memerkosa dan kekerasan seksual terhadap perempuan dianggap hal yang lazim dilakukan.⁵ Bentuk dari *rape culture* dapat berupa *slutshaming*, *victimblaming*, obyektifikasi perempuan, memaklumkan perilaku pelaku dan meremehkan korban perkosaan.⁶ *Rape culture* pada dasarnya memiliki tujuan mendegradasi, menciptakan terror, serta menciptakan batasan-batasan terhadap perempuan. Fenomena ini kemudian menciptakan masyarakat yang mengabaikan hak-hak serta keselamatan perempuan karena memaklumi bahwa sikap agresif laki-laki adalah normal. Berikut bentuk *rape culture* paling sering terjadi di Kanada ialah:

⁴ Young Women Canada, (1995), *Selected Estimates of the Costs of Violence Against Women*, diakses dalam http://ywcacanada.ca/data/research_docs/00000 (20/05/2016, 01:13 WIB).

⁵ Elizabeth A. Sheehy, 2012, *Sexual Assault in Canada: Law, Legal, Practice, and Women Activism*, Ottawa: University of Ottawa Press, hal. 14.

⁶ *Ibid.*, Hal. 14.

2.1.1 *Victim blaming*

Aksi kejahatan merupakan pilihan individu atau kelompok untuk menyelesaikan permasalahan. Kejahatan yang dilakukan individu maupun kelompok ini pastinya merugikan korbannya hingga menyalahkan korban sebagai pihak yang mengundang terjadinya kejahatan. Pelaku kejahatan akan menyalahkan korbannya sebagai pihak yang terlebih dahulu mengundang terjadinya kejahatan seperti contoh ketika seseorang berbelanja dan mengeluarkan uangnya lalu terjadi penjabretan, pihak korban akan disalahkan karena mengundang terjadinya penjabretan dengan cara memperlihatkan uangnya dan seorang istri yang melakukan kelalaian kecil mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pihak istri disalahkan karena melakukan kelalaian tersebut. Tindakan ini dinamakan *victim-blaming*.

Victim-blaming yang merupakan sikap mendevaluasi atau menyalahkan korban dan menuntut korban yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan tersebut.⁷ Tindakan devaluasi terhadap korban ini muncul karena adanya respon negatif dari masyarakat sosial dalam memandang suatu kejadian. Respon negatif ini dapat tercipta dari media, nilai, atau *stereotype* masyarakat dalam menggambarkan suatu konflik sehingga menciptakan kesalahpahaman dan meyakini bahwa korban tersebut pantas menerima perlakuan seperti itu.⁸ Respon dan kesalahpahaman sosial inilah yang kemudian berdampak pada kehidupan

⁷ *Victim Blame*(2007), diakses dalam <http://www.ibiblio.org/rcip/vb.html> (07/01/2017, 08:35 WIB)

⁸ Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes, *Victim Blaming*, Diakses dalam https://crevc.ca/docs/victim_blaming.pdf . (07/01/2017, 09:00 WIB).

korban kasus kejahatan dalam segala aspek seperti aspek kehidupan keluarga, kehidupan sosial, dan pekerjaannya.

Victim blaming sering terjadi pada kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, pembunuhan, perampokan dan prostitusi. Pada kasus kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, perempuan dinilai menjadi pihak yang disalahkan. Penilaian itu terjadi karena nilai masyarakat memaklumi sikap kasar laki-laki terhadap perempuan dan menilai bahwa apa yang dilakukan laki-laki adalah wajar. Masyarakat memaklumi ketika laki-laki marah atau emosi wajar jika mereka melakukan kekerasan sehingga pandangan masyarakat ini kemudian berkembang dan menjadi nilai sosial.⁹

Perempuan disalahkan dan menjadi masokis merupakan hal yang umum dalam kehidupan sosial karena mereka dianggap pantas menerima dan meminta perlakuan itu bahkan tidak sedikit yang peduli dan bertanya mengapa perempuan itu tetap bertahan dengan laki-laki yang melakukan kekerasan terhadapnya. Tindakan yang dilakukan perempuan dengan memilih bertahan dengan laki-laki yang melakukan kekerasan terhadapnya juga merupakan tindakan memaklumi kekerasan laki-laki yang mana dapat menghapus tanggung jawab laki-laki sebagai pelaku kekerasan.¹⁰ Tindakan *victim blaming* juga umum terjadi dalam kasus kekerasan seksual seperti kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Perempuan dewasa yang mengalami kekerasan seksual sering dinilai sebagai pihak yang bersalah karena etika yang buruk, cara berpakaian yang provokatif, dan menggoda.

⁹ K. Henning & R. Holdford, 2006, *Minimization, Denial, and Victim Blaming by Batterers: How Much Does the Truth Matter?*. Criminal Justice and Behaviour, Canada, hal. 110.

¹⁰ Zur, O., *Rethinking "Don't Blame the Victim"*. Journal of Couple Therapy, Vol. 4. 4 (1994, 15-36) diakses dalam <http://www.zurinstitute.com/victimhood.htm>. (07/01/2017, 09:17 WIB).

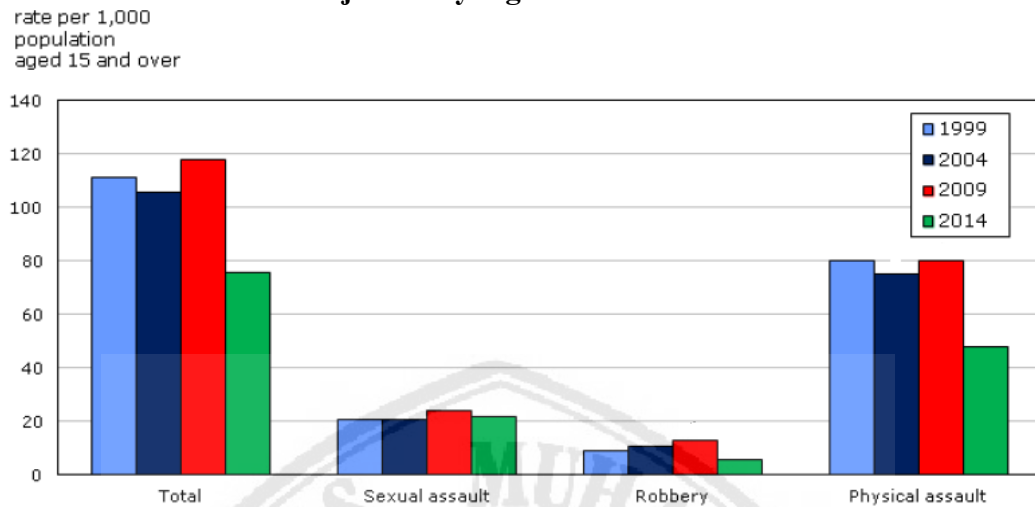
Kasus *victim blaming* memang marak terjadi di Kanada. Pada tahun 1983, Kanada pertama kali mengesahkan *rape shield laws*¹¹ yang mana perlu memeriksa latar belakang, cara berpakaian, dan gaya hidup korban kekerasan seksual sebelum memutuskan perkara.¹² Salah satu contoh kasus sederhana bagaimana *victim blaming* dilakukan dengan cara menyalahkan korban pemerkosaan sebagai penyebab kejahatan karena cara berpakaian seperti kasus pemerkosaan yang pernah terjadi di Manitoba, Kanada dimana hakim mendakwa bahwa kejadian itu terjadi karena cara berpakaian dan perilaku agresif korban. Sikap hakim yang menyalahkan korban menciptakan efek jera terhadap korban untuk melapor jika terjadi kejahatan untuk kedua kalinya.

Fenomena *victim blaming* di Kanada bukanlah isu baru. Perhatian pemerintah sangat diperlukan dalam menanggulangi fenomena yang dapat berdampak serius pada kehidupan individu. Efek dari *victim blaming* di Kanada telah menciptakan ketidakstabilan keamanan karena banyak kasus yang tidak dilaporkan sehingga tidak ada penanganan untuk pencegahan kejahatan tersebut. Berikut data *victim blaming* yang dilaporkan Badan Survey Statistika Hukum Kanada menurut jenis kriminalnya:

¹¹ *Rape Shield Laws* adalah hukum yang mengatur prosedur penyelesaian kasus pemerkosaan di Kanada.

¹² McIntyre, *Op. Cit.*

Grafik 2.1: Kejadian *Victim Blaming* yang Dilaporkan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dilakukan di Kanada¹³



Data di atas menggambarkan hasil survey yang diambil badan statistika Kanada terkait *victim blaming* yang dilaporkan per 1000 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Hasil survey di atas menunjukkan bahwa kasus *victim blaming* yang dilaporkan banyak terjadi pada tahun 2009. *Victim blaming* sering terjadi pada kasus kekerasan fisik menurut data diatas. Jumlah fenomena *victim blaming* yang dilaporkan dan tidak dilaporkan ternyata lebih banyak yang tidak dilaporkan. Berikut data yang dikutip oleh badan statistika hukum Kanada terkait jumlah kasus kejahatan yang tidak dilaporkan akibat *victim blaming*:

¹³ Canadian Centre for Justice Statistics Criminal victimization in Canada, 2014 Survey, diakses melalui <http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2013001/article/14241-eng.pdf> (09/01/2018, 00:08 WIB).

Tabel 2.2 : Kejadian *Victim Blaming* yang Tidak Dilaporkan Berdasarkan Jenis Kejahatan Yang Dilakukan ¹⁴

Type of offence	1999			2004			2009			2014†		
	Not reported	Reported	Don't know/refusal	Not reported	Reported	Don't know/refusal	Not reported	Reported	Don't know/refusal	Not reported	Reported	Don't know/refusal
	percent											
Total victimization ¹	59*	37*	3	64	34*	2	68	31	1*	67	31	2
Violent victimization incidents ¹												
Sexual assault ²	78	F	14	88	8 ^E	4*	88	F	F	83	5 ^E	12 ^E
Robbery	51	46	F	53	46	F	56	43	F	54	45	F
Physical assault	61	37	F	60	39	F	65	34	F	60	38	F

Keterangan:

F= data dirahasiakan karena privasi korban

E= dilaporkan dengan peringatan

Menurut data statistika diatas jenis kejahatan yang paling tinggi tidak dilaporkan akibat adanya *victim blaming* adalah kekerasan seksual berbeda dengan data yang dilaporkan. Pada tahun 2014 ada sekitar 83% kekerasan seksual, 54% perampokan, dan 60% kekerasan fisik yang tidak dilaporkan. Tahun 2004 hingga 2009 angka viktimisasi terhadap kekerasan seksual tetap konsisten dengan rating 88%. Hal ini membuktikan bahwa kejadian *victim blaming* membutuhkan penanganan segera dari pemerintah dan dukungan masyarakat.

Dampak dari tindakan *victim blaming* dapat merugikan korbannya terutama bagi korban yang tidak bersalah. Mereka yang menjadi korban dan tidak bersalah dituntut harus bertanggung jawab dan menerima resiko atas kejahatan yang mereka alami. Akibatnya korban *victim blaming* tidak akan lagi melaporkan lagi kejahatan

¹⁴ Canadian Centre for Justice Statistics Criminal victimization in Canada, 2014 Survey, diakses melalui <http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2013001/article/14241-eng.pdf> (09/01/2018, 00:08 WIB).

untuk yang kedua kalinya apabila disalahkan.¹⁵ Hal ini dapat berdampak pada stabilitas keamanan karena jika kejahatan tidak dilaporkan lagi maka tidak akan ada penanganan sehingga kejahatan semakin marak.

2.1.2 *Slutshaming*

“*Slut*” pada dasarnya berarti pelacur. Pelacur memiliki pengertian perempuan yang menjajakan tubuhnya untuk tujuan prostitusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Kalimat *slut* atau pelacur kini telah mengalami pergeseran makna dan menjadi suatu stigma sosial untuk mendeskripsikan kepribadian individu. Stigma “pelacur” ini digunakan untuk menggambarkan perempuan dengan cara berpakaian provokatif, gaya hidup buruk, dan perilaku yang buruk. *Slut shaming* didefinisikan sebagai pendekatan stigma psikologi sosial yang mana dalam konteks seksual, label ini ditujukan kepada orang yang dianggap bermartabat rendah.¹⁶ Julukan “*Slut*” juga berlaku kepada korban kekerasan seksual khususnya perempuan sehingga kalimat “*Slut*” otomatis tidak dapat dipisahkan dari fenomena *victim blaming* dan *slut shaming*. *Slut shaming* adalah tindakan mengkaitkan segala hal yang dilakukan oleh individu dengan kalimat “pelacur”.

Slut shaming merupakan bentuk penindasan terhadap seksualitas perempuan melalui suatu kalimat buruk yang indentik dengan perempuan.¹⁷ Penindasan melalui kalimat *slut* atau pelacur sudah dilakukan sejak dahulu kala bahkan turun temurun sehingga tertanam pada pemikiran masyarakat sosial dan

¹⁵ Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes, *Op. Cit.*, Hal. 6.

¹⁶ Armstrong, Hamilton, & Seeley, J. L, “*Good Girls*”: *Gender, Social Class, And Slut Discourse On Campus*. Social Psychology Quarterly, Diakses dalam <http://spq.sagepub.com/content/77/2/100.full.pdf+html>. (07/01/2017, 21:09 WIB).

¹⁷ R. Baumeister and J. Twenge, *Cultural suppression of Female Sexuality*. Review of General Pschyology, vol. 6, no. 2 (2002), Rome: Diva Publisher, hal. 166.

menjadi suatu pedoman masyarakat sosial. Kalimat “*Slut*” ini kemudian digunakan untuk menggambarkan *stereotype* perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual karena perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dianggap sebagai subyek yang memancing terjadi kekerasan seksual dengan cara berpakaian yang provokatif dan perilaku yang memicu terjadinya kekerasan.¹⁸ Masyarakat umumnya akan berkata bahwa “pelacur itu pantas mendapatkan apa yang sesuai dia lakukan” terhadap korban kekerasan seksual yang mengalami kejadian *victim blaming*.

Tindakan *slut shaming* merupakan usaha untuk mendiskreditkan individu atau korban kekerasan seksual dengan cara memberikan label “pelacur” yang memiliki konotasi negatif. Tujuan *slut shaming* sendiri ialah untuk merendahkan dan menciptakan rasa bersalah kepada perempuan yang memakai pakaian provokatif dan beretika buruk seperti pelacur. *Stereotype slut shaming* terhadap korban kekerasan seksual memang sudah melekat sehingga membutuhkan usaha keras untuk merubah *stereotype slut shaming* yang terlahir dari *rape culture*.

Slut shaming di Kanada bukan fenomena yang asing. *Statusquo slut shaming* di Kanada sudah berkembang dan menjadi bagian dari kasus *victim blaming* juga. Bentuk *slut shaming* di Kanada tidak hanya terjadi pada korban kekerasan seksual, namun juga para remaja atau abg yang menggunakan media sosial yang dikenal dengan *cyberslut-shaming*.¹⁹ *Cyberslut-shaming* ini merupakan

¹⁸*Ibid*, hal. 5.

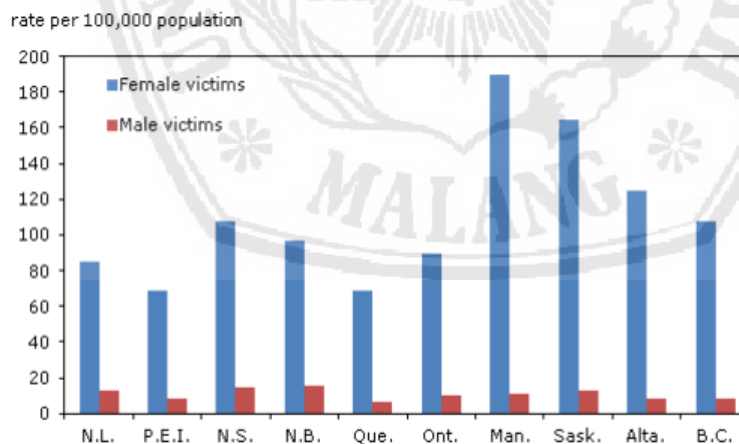
¹⁹ Emily Poole, *Hey Girls, Did You Know? Slut-Shaming On The Internet Needs To Stop* diakses dalam <http://lawblog.usfca.edu/lawreview/wp-content/uploads/2014/09/Hey-Girls-Did-You-Know-Slut-Shaming-on-the-Internet-Needs-to-Stop.pdf> (13/01/2017, 11:52 WIB).

bentuk obyektifikasi seksualitas perempuan yang digambarkan seperti pelacur melalui internet.

2.2. Keselamatan Perempuan Kanada

Kasus kekerasan seksual di Kanada merupakan kasus yang paling umum terjadi sehingga perlu penanganan khusus dari pemerintah dan dukungan masyarakat. Kekerasan seksual terhadap perempuan yang sudah dianggap umum di Kanada telah mengganggu keselamatan perempuan. Menurut Sinha, kekerasan seksual terhadap perempuan adalah penghalang terbesar terciptanya *gender equality*, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental.²⁰ Maraknya kasus kekerasan seksual dibuktikan dari data statistika yang dilansir oleh UCR:

Grafik 2.3 : Kekerasan Seksual di Kanada berdasarkan Jenis Kelamin²¹



Note: Rates are calculated per 100,000 population aged 15 years and older. Excludes incidents where the sex and/or age of victim was unknown.

²⁰ M. Sinha (2013). *Measuring violence against women: Statistical trends*. Component of Statistics Canada catalogue no. 85-002-X Juristat. Diakses dalam <http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2013001/article/11766-eng.pdf> (09/05/2016, 09:08 WIB).

²¹ Statistics Canada, *Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey*. Diakses melalui <http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2013001/article/11766-eng.pdf> (15/01/2017, 15:02 WIB).

Uniform Crime Reporting Survey (UCR) melansir data mengenai kekerasan seksual yang mana jumlah korban mayoritas adalah perempuan di setiap provinsi. Berdasarkan data diatas rating kekerasan seksual terhadap perempuan tertinggi terdapat di wilayah provinsi Manitoba dan Saskatchewan dengan jumlah 189 dan 164 korban per 100.000 perempuan. Rating kekerasan terhadap perempuan terendah terdapat di wilayah provinsi Quebec dan Prince Edward Island dengan jumlah 69 korban per 100.000 perempuan. Data diatas adalah data resmi yang didapat dari kepolisian Kanada berdasarkan kejahatan yang dilaporkan, sedangkan kejahatan kekerasan seksual yang tidak dilaporkan jumlahnya jauh lebih tinggi dari sebenarnya.²²

Skala kekerasan seksual yang dianggap umum di Kanada ini kemudian mengakar kedalam pemikiran masyarakat bahwa kekerasan seksual terjadi karena pihak korban yang mengundang terjadinya kejahatan. Pemikiran masyarakat ini terbentuk karena nilai-nilai rasisme, marjinalisasi, dan kesenjangan yang masih kuat.²³ Nilai-nilai ini kemudian mendorong berkembangnya pemikiran masyarakat yang tidak peduli terhadap kesejahteraan dan keselamatan perempuan di Kanada.

Perempuan dengan ekonomi menengah ke bawah dan ras Aborigin lebih rentan mengalami kekerasan seksual di Kanada.²⁴ Dalam sebuah survei pemerintah 2009 dari sepuluh provinsi, perempuan Aborigin hampir tiga kali lebih mungkin dibandingkan perempuan non-Aborigin untuk melapor menjadi korban dari

²² *Ibid*, Hal. 15.

²³ International's Concerns And Call To Action, *Violence Against Indigenous Women And Girls In Canada: A Summary Of Amnesty*, February 2014 Diakses Dalam https://www.amnesty.ca/sites/amnesty/files/Iwfa_Submission_Amnesty_International_February_2014_-_Final.Pdf (15/01/2017, 09:53 WIB).

²⁴ *Ibid*, hal. 3.

kejahatan kekerasan.²⁵ Laporan kepolisian Kanada melansir bahwa tingkat pembunuhan untuk perempuan ekonomi bawah dan Aborigin setidaknya tujuh kali lebih tinggi dibandingkan perempuan yang ekonominya menengah keatas.²⁶ Kasus hilangnya perempuan di provinsi Saskatchewan 60% berekonomi menengah kebawah dan ras aborigin dan 6% terjadi kepada perempuan berekonomi atas.²⁷ Bahkan *Native Women Association of Canada* berhasil mendokumentasikan 582 kasus pembunuhan dan hilangnya para perempuan ekonomi bawah dan aborigin sepanjang tahun 1998 hingga 2014.²⁸ Data-data tersebut merupakan bukti bahwa pelaku laki-laki yang melakukan kekerasan seksual memang menargetkan perempuan dengan ekonomi bawah dan ras Aborigin karena nilai-nilai rasisme terhadap kalangan tersebut masih tinggi sehingga memungkinkan para pelaku untuk tidak disalahkan.

Kasus hilang dan pembunuhan terhadap perempuan ekonomi bawah dan ras Aborigin telah banyak dilaporkan namun tidak ada langkah cepat dan efektif dari pihak kepolisian. Kasus kekerasan seksual bahkan pembunuhan dianggap remeh dan diabaikan karena merupakan hal umum dan tidak dianggap sebagai suatu kejahatan

²⁵ Shannon Brennan, *Violent Victimization of Aboriginal Women in the Canadian Provinces* (Statistics Canada, 2011), diakses dalam www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2011001/article/11439-eng.htm (15/01/2017, 10:15 WIB).

²⁶ Vivian O'Donnell and Susan Wallace, *Women in Canada: A Gender-based Statistical Report: First Nations, Inuit and Métis Women* (Statistics Canada, 2011), diakses dalam www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11442-eng.pdf. (15/01/2017, 10:25 WIB).

²⁷ *Saskatchewan Provincial Partnership Committee on Missing Persons, Final Report* (October 2007), diakses dalam www.justice.gov.sk.ca/adx/asp/adxGetMedia.aspx?DocID=3025,104,81,1,Documents&MediaID=1615&Filename=missing-persons-final.pdf. (15/01/2017, 11:15 WIB).

²⁸ Native Women's Association of Canada, *What their voices tell us: Research findings from the Sisters in Spirit Initiative* (March 2010), diakses dalam www.nwac.ca/sites/default/files/reports/2010_NWAC_SIS_Report_EN.pdf (15/01/2017, 19:01 WIB).

serius. Pihak polisi juga dinilai masih bias dalam kasus yang terjadi terhadap perempuan ekonomi bawah dan aborigin sehingga kasus tersebut membuat pihak korban memilih diam dan tidak melapor karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan keadilan.²⁹ Menurut data statistik Kanada, dalam sebagian besar kasus pembunuhan yang melibatkan ras Aborigin, polisi gagal untuk menginvestigasi dan mengidentifikasi korban sehingga tidak ada data statistik yang resmi mengenai jumlah pasti korban perempuan yang hilang dan dibunuh akibat kekerasan seksual.³⁰

2.3. Upaya Pemerintah Kanada dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual

Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Salah satu langkah pemerintah Kanada dalam menangani kasus tersebut dengan cara mengesahkan amandemen *Rape Shield Law* yang disahkan pada tahun 1991.³¹ *Rape shield law* merupakan hukum yang memberikan batasan terhadap tersangka dalam menunjukkan bukti-bukti dan melarang adanya publikasi terhadap korban kekerasan seksual.³² Sebelum *rape shield law* mengalami perubahan pada tahun 1991, pemerintah Kanada masih menggunakan hukum *rape shield law* 1983 yang mana menginvestigasi kasus kekerasan seksual dilihat dari cara perempuan berpakaian, etikanya, dan gaya

²⁹ O'Donnell, *Op. Cit.*, hal. 3.

³⁰ *Ibid*, hal. 3.

³¹ McIntyre, 2011, *No jail for rapist because victim 'wanted to party'* Canadian News, *Financial News and Opinion*, National Post. Diakses melalui <http://news.nationalpost.com/2011/02/24/no-jail-for-rapist-because-victim-wanted-to-party/> (20/05/2016, 07:10 WIB).

³² Kwong-leung Tang, *Rape Law Reform in Canada: The Success and Limits of Legislation*, diakses dalam <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.484.3523&rep=rep1&type=pdf> . (15/01/2017, 20:16 WIB).

hidupnya. *Rape shield law* 1983 yang terkesan diskriminasi dan memojokkan perempuan kemudian diamandemen menjadi *rape shield law* 1991.³³

Rape shield law pernah diterapkan pada kasus Seaboyer (1991) dengan membatasi pertanyaan terhadap korban mengenai hubungan seksual dalam kasus kekerasan seksual. Seaboyer adalah seorang pemuda dengan dakwaan penyerangan seksual. Seaboyer mengajukan permohonan hak untuk memperkenalkan bukti yang berkaitan dengan sejarah terjadinya kekerasan seksual sebelum kasusnya sampai ke pengadilan. Kasus ini kemudian diajukan ke Mahkamah Agung Kanada, dan keputusan mayoritas pengadilan memutuskan untuk menggunakan *rape shield law* 1983 yang mana menurut undang-undang tersebut penyebab kejadian kekerasan seksual dilihat dari cara berpakaian, berperilaku, dan gaya hidup korbannya.³⁴ Keputusan hakim dinilai berlawanan dengan *Canadian Charter Of Rights and Freedoms* pada bagian 1 dan 7.³⁵ Berikut isi *Canadian Charter of Rights and Freedoms* bagian 1 dan 7:³⁶

1. Bagian (1) tentang *Rights and freedoms in Canada* yang berbunyi:

“The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society.”

³³ *Ibid.*, Hal. 8.

³⁴ *Ibid.*, Hal. 8.

³⁵ *Ibid.*, Hal. 8.

³⁶ *CONSTITUTION ACT 1982*, Canada Justice Laws Website diakses dalam <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html> (31/01/2017, 08:42 WIB).

Piagam Kanada pada bagian 1 memiliki makna bahwa Piagam Kanada tentang hak dan kebebasan menjamin hak dan kebebasan setiap individu dalam hukum sesuai dengan asas demokrasi dalam masyarakat.

2. Bagian (7) tentang *Legal Rights: Life, Liberty and Security of Person* yang berbunyi:

“Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.”

Piagam Kanada pada bagian 7 memiliki makna bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan tanpa gangguan.

Keputusan hakim yang membebaskan Seaboyer dari tuntutan memicu kemarahan publik dan membangkitkan kelompok-kelompok perempuan yang berasumsi bahwa *Canadian Charter of Rights and Freedoms* yang telah lama menjadi pedoman hukum Kanada akan membatasi penggunaan bukti sejarah seksual yang tidak relevan. Kelompok-kelompok perempuan menghimbau bahwa hal tersebut dapat membuat korban tidak akan melaporkan kasus kekerasan seksual untuk yang kedua kalinya karena ketakutan akan viktimisasi dan *stereotype* negatif dari masyarakat. Keputusan pemerintah Kanada yang menggunakan *rape shield law* 1983 dinilai rasis dan memarginalisasi kaum perempuan kemudian memicu pertentangan sehingga diamandemen pada tahun 1991. Kemudian pemerintah federal Kanada merespon kejadian tersebut untuk mengkaji ulang kasus melalui undang-undang Bill C-49 Bagian 276 yang isinya:³⁷

³⁷ *Ibid.*, Hal. 9.

- (1) Memberikan suatu persyaratan pemberitahuan tertulis untuk sidang dalam menentukan diterimanya bukti tersebut.
- (2) Memberikan hakim keleluasaan untuk mengakui bukti tersebut jika bukti itu sah secara hukum seperti: (A) contoh spesifik dari aktivitas seksual; (B) relevan dengan masalah yang akan dibuktikan di pengadilan; dan (C) memiliki nilai pembuktian yang signifikan yang substansial. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang untuk membuktikan valid atau tidaknya bukti yang diajukan terdakwa sebagai pembelaan.

Kasus kekerasan seksual kemudian menjadi umum dan berkembang meluas karena banyaknya viktimisasi terhadap korban sehingga memberikan keleluasan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan lagi. Pada tahun 2010 pemerintah federal Kanada mengumumkan rencana untuk menghabiskan \$10 juta Dollar US selama lima tahun terakhir sebagai upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan.³⁸ Dana tersebut dialokasikan untuk memberi gaji polisi yang melacak dan menginvestigasi kasus kekerasan seksual baik yang mengakibatkan korban trauma, hilang, dan terbunuh. Faktanya, terkait program tersebut banyak hambatan seperti penundaan dana yang lama dan pemotongan dana sehingga membuat kasus kekerasan seksual lamban untuk diselesaikan. Sampai saat ini belum ada penanganan efektif dan efisien dari pemerintah nasional untuk menangani kasus tersebut.³⁹

³⁸ Amnesty International, *Our Work, Issues, Indigenous Peoples: No More Stolen Sisters*, diakses dalam www.amnesty.ca/our-work/issues/indigenous-peoples/no-more-stolen-sisters. (16/01/2017, 08:34 WIB).

³⁹ *Ibid.*, Hal. 2.

Upaya pemerintah Kanada tidak hanya membuat *rape shield law* dan membuat perencanaan dana untuk penanganan kasus kekerasan seksual namun juga menjerat kekerasan seksual terhadap perempuan dengan undang-undang Kanada section 271 yang isinya:⁴⁰

“Everyone who commits a sexual assault is guilty of (a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 10 years or, if the complainant is under the age of 16 years, to imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year; or (b) an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not more than 18 months or, if the complainant is under the age of 16 years, to imprisonment for a term of not more than two years less a day and to a minimum punishment of imprisonment for a term of six months.”

Undang-undang Kanada 271 terkait kasus kekerasan seksual yang menjerat pelaku berisi: (271) Setiap orang yang melakukan penyerangan seksual bersalah (A) pelanggaran dapat dituntut dan dipidana dengan penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun atau, jika pelapor adalah di atas usia 16 tahun, penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 14 tahun atau (B) suatu pelanggaran dihukum atas pelecehan seksual dan pemerkosaan dimasukkan ke dalam penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 18 bulan, jika pelapor adalah di bawah usia 16 tahun, penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua tahun kurang sehari dan untuk hukuman minimal penjara untuk jangka waktu enam bulan, jika pelapor diatas umur 16 tahun.

⁴⁰ *Criminal Justice: Sexual assault*, Justice Law Website Canada diakses dalam <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-271.html> (04/02/2017, 15:01 WIB).

Pemerintah Kanada sendiri tidak memiliki kebijakan yang dinilai efektif terkait penanganan kasus kekerasan seksual. *Rape shield law*, perencanaan pendanaan pencegahan *sexual violence* dan hukum, dinilai hanya menjerat pelaku pemerkosaan padahal bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan bukan hanya pemerkosaan. Kebijakan pemerintah Kanada terkait *rape shield law*, perencanaan dana dan hukuman untuk menjerat pelaku dinilai kurang menciptakan efek jera terhadap pelaku sehingga dinilai kurang efektif. Kebijakan pemerintah yang kurang efektif ini kemudian membuat pemerintahan provinsi Quebec di Kanada memiliki kebijakan khusus untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dengan cara membuat program *Quebec's Action Plan on Sexual Assault* pada tahun 2008 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan dukungan dari komunitas budaya, komunitas perempuan Aborigin, komunitas perempuan dengan keterbatasan fungsional dan komunitas perempuan lansia melalui sosialisasi dan edukasi.⁴¹ Program provinsi ini juga difokuskan menangani dampak sosial, pendidikan, dan kesehatan pada korbannya dengan cara memberikan edukasi dan rehabilitasi.⁴² Program *violence against women* yang di terapkan provinsi Quebec, Kanada berhasil menempatkan provinsi tersebut dengan rating kekerasan seksual terendah terhadap perempuan di Kanada. Quebec merupakan provinsi pertama di Kanada yang memiliki inisiatif untuk menangani kasus kekerasan seksual yang kemudian pada tahun 2010 diikuti oleh New Burnswick. New Burnswick pada tahun 2010 membuat program *Strategy on*

⁴¹ Bennoit, *Op. Cit*, Hal. 30.

⁴² *Ibid*, Hal. 30.

Sexual Assault Services yang mana program tersebut melayani keluhan dan laporan masyarakat tentang kejadian pelecehan serta memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual.⁴³



⁴³ *Ibid*, Hal. 31.